

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam analisis mikro ekonomi perkataan “pertumbuhan ekonomi” mempunyai dua segi pengertian berbeda. Di satu pihak istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu perekonomian telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan mencapai hasrat kemakmuran yang lebih tinggi. Di lain segi istilah tersebut bertujuan untuk menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi dalam jangka panjang (Sukirno, 2000).

Tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata. Pemerataan pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan pemerataan pusat dan daerah seperti yang diharapkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang penyelenggaraan daerah otonomi yang berkaitan dengan pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta penimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dasar dari otonomi daerah adalah memberi kewenangan yang luas dan nyata yang bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta penimbangan keuangan pusat dan daerah, jadi prinsip otonomi daerah itu akan mendukung

masyarakat daerah untuk ikut melaksanakan pembangunan dan memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pada awal pembangunan ekonomi suatu daerah, pada umumnya perencanaan pembangunan berorientasi pada permasalahan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. GDP itu sendiri merupakan batang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat pada suatu daerah dalam satu tahun. GDP atau PDRB merupakan ukuran paling mudah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Wijaya, 2000).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu peralihan atau pertambahan dari tahun ke tahun perekonomian yang bercorak sederhana menuju ke tingkat ekonomi yang lebih maju. Dalam perkembangannya tersebut terlaksana hanya satu transformasi dan pergeseran dari kegiatan sektor produksi primer ke sektor produksi sekunder (konstruksi) dan sektor tersier (jasa). Selain itu tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan pendidikan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah (Sumitro Djojohadikusumo, 1994).

Keadaan perekonomian yang terjadi sebenarnya tidak selalu sama dengan perencanaan yang telah dicanangkan atau dibuat oleh pemerintah melalui badan perencanaan ekonomi (Bapenas di Indonesia). Kadang terjadi

inflasi yang tinggi, pengangguran yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kemacetan.

Dilain waktu mungkin terjadi inflasi yang rendah, pengangguran yang tinggi dan pertumbuhan rendah. Keadaan ini merupakan gejala ekonomi makro yang tidak dikehendaki oleh masyarakat atau pemerintah sebagai pelaku ekonomi, menghadapi keadaan seperti ini perlu adanya usaha untuk mengatasi atau mencegah timbulnya masalah dalam perekonomian. Tindakan pemerintah sebagai pelaku ekonomi, atau sebagai pengatur perekonomian secara keseluruhan sangat diperlukan berupa kebijakan ekonomi makro dengan kebijakan moneter.

Pertumbuhan ekonomi didalam perekonomian dipengaruhi oleh banyak variabel diantaranya inflasi dan jumlah pengangguran. Beberapa variabel tersebut memiliki hubungan yang erat terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Pekalongan dari data diatas dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Periode tahun 2000-2001, PDRB Pekalongan mencapai kenaikan 4,32%. Tahun 2001 ke tahun 2002 mencapai 3,32%, tahun 2002 ke tahun 2003 mengalami peningkatan 3,56% sedangkan pada tahun 2003 sampai tahun 2004 PDRB kabupaten Pekalongan mencapai kenaikan sebesar 4,03%.

Inflasi adalah merupakan salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi terjadi karena kenaikan BBM yang biasanya bertepatan pada awal bulan Ramadhan, Lebaran, Natal

dan tahun baru yang pada saat tersebut cenderung terjadi kenaikan harga barang sebesar 20% dari harga biasa, kenaikan tersebut tidak tergolong sebagai inflasi tetapi kenaikan semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau penyebab ekonomi atau tidak memerlukan kebijakan khusus untuk menanggulangnya (Boediono, 1996: 161). Inflasi kabupaten Pekalongan dari tahun 2000 ke tahun 2001 mengalami penurunan 3,83%, tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 1,90%, pada tahun 2003 turun sebesar 67,5%, sedangkan pada tahun 2004 mengalami peningkatan inflasi sebesar 69,8%.

Pengangguran merupakan masalah utama ekonomi karenanya jelas mengapa upaya untuk menurunkan masalah tingkat pengangguran menjadi sangat penting, terutama mencegah pengaruh atau imbas dari pengangguran. Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun harus dibarengi dengan upaya pembangunan di segala bidang, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus berjalan lancar. Jumlah penangguran yang merupakan angkatan kerja kabupaten Pekalongan dari tahun 2000 ke tahun 2001 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 65,8%, sedangkan dari tahun 2001 sampai tahun 2004 mengalami peningkatan jumlah pengangguran.

Tabel 1.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pekalongan 2000-2004

Tahun	PDRB	Inflasi	Jumlah Pengangguran
2000	862.264.910	11,46	630.792
2001	899.546.404	11,02	215.398
2002	929.459.026	10,23	651.131
2003	962.618.072	3,32	665.834
2004	1.001.444.102	5,64	569.722

Sumber : - Kantor Statistik Kabupaten Pekalongan
- Survey Sosial Ekonomi Nasional (susenas)

Dalam suatu proses pertumbuhan ekonomi salah satu indikator yang digunakan oleh para ahli ekonomi guna melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu bangsa atau penduduk suatu daerah adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui proses pertumbuhan ekonomi tersebut akan tercermin kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan dan dicapai di kabupaten Pekalongan selama periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi harus dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk karena pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi harus dinikmati oleh penduduk, maka laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat dinikmati penduduk jika laju pertumbuhan penduduk jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat itu dapat dipandang dari standar hidup masyarakat di suatu daerah. Standar hidup penduduk diukur dengan kenaikan pendapatan riil perkapita. Pendapatan riil perkapita, adalah setara dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) selama satu tahun dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut. Jadi standar hidup tidak dapat dinaikkan kecuali jika PDRB-nya meningkat dengan lebih cepat dibanding pertumbuhan penduduk. Pengeluaran pemerintah, inflasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk akan dapat mempengaruhi PDRB. Begitu pula di kabupaten Pekalongan setiap tahunnya selalu mengharapkan adanya peningkatan PDRB melalui berbagai indikasi tersebut.

Berdasarkan pada hal tersebut maka dalam penelitian ini mengambil judul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PDRB DI KABUPATEN PEKALONGAN 1979-2004”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, inflasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap PDRB di kabupaten Pekalongan 1979-2004.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas bahwa penelitian ini akan melihat pengaruh hubungan inflasi, investasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap PDRB. Secara spesifikasi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, inflasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap PDRB di kabupaten Pekalongan tahun 1979-2004.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan bagi penulis tentang hubungan pengeluaran pemerintah, inflasi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan PDRB di kabupaten Pekalongan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan

pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya oleh pihak yang bersangkutan.

3. Menambah referensi yang sudah ada sehingga dapat memperkaya khasanah penelitian.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengeluaran pemerintah akan berpengaruh positif terhadap PDRB di kabupaten Pekalongan.
2. Inflasi akan berpengaruh negatif terhadap PDRB di Kabupaten Pekalongan.
3. Jumlah tenaga kerja akan berpengaruh positif terhadap PDRB di Kabupaten Pekalongan.
4. Jumlah penduduk akan berpengaruh positif terhadap PDRB di Kabupaten Pekalongan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperlukan atau dikumpulkan dari pihak lain. Adapun sumber data dan penelitian ini berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS) serta

sumber lainnya yang terikat dengan penelitian ini dan merupakan data *time series* dengan kurun waktu 1979-2004.

2. Alat dan Model Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan metode OLS. Adapun adapun model yang digunakan adalah *Error Corelation Model* (ECM).

Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, inflasi, tenaga kerja, dan jumlah penduduk terhadap PDRB digunakan model ECM (*Error Corelation Model*)

Adapun koreksi kesalahan diformulasikan dalam hubungan jangka pendek dan jangka panjang sebagai berikut (Ramanathan, 1995: 557).

Model koreksi kesalahan dalam hubungan jangka panjang:

$$\begin{aligned} \text{PDRB} = & \gamma_0 + \gamma_1 \text{PP}_t + \gamma_2 \text{INF}_t + \gamma_3 \text{TK}_t + \gamma_4 \text{JP}_t + \gamma_5 \text{PP}_{t-1} + \gamma_6 \text{INF}_{t-1} + \gamma_7 \\ & \text{TK}_{t-1} + \gamma_8 \text{JP}_{t-1} + \gamma_9 \text{ECT} + \text{Ut} \dots\dots\dots(1) \end{aligned}$$

Model koreksi kesalahan dalam hubungan jangka panjang:

$$\text{PDRB}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{PP}_t + \beta_2 \text{INF}_t + \beta_3 \text{TK}_t + \beta_4 \text{JP}_t \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

$$\text{ECT} = \text{PP}_{t-1} + \text{INF}_{t-1} + \text{TK}_{t-1} + \text{JP}_{t-1} - \text{PDRB}_{t-1}$$

Koefisien jangka pendek :

$$\text{Y}_1 \dots\dots \text{Y}_4 = \alpha_1 \dots\dots \alpha_4$$

Koefisien jangka panjang :

$$\text{Y}_0 = \beta_0$$

$$\text{Y}_5 = \lambda (1 - \beta_1)$$

$$Y_6 = \lambda (1 - \beta_2)$$

$$Y_7 = \lambda (1 - \beta_3)$$

$$Y_8 = \lambda (1 - \beta_4)$$

$Y_9 = \lambda$: koefisien penyesuaian

Ut = variable pengganggu

Keterangan :

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (jutaan rupiah)

PP : Peraturan Pemerintah (jutaan rupiah)

INF : Inflasi (persen)

TK : Jumlah tenaga kerja (jiwa)

JP : Jumlah penduduk (jiwa)

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi alat dan model analisis, definisi operasional variabel, penurunan model ECM, data yang terdiri dari jenis dan sumber data, pengujian asumsi klasik, uji kebaikan modal, uji validitas pengaruh.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum dari obyek penelitian, data yang diperoleh, analisis dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian.